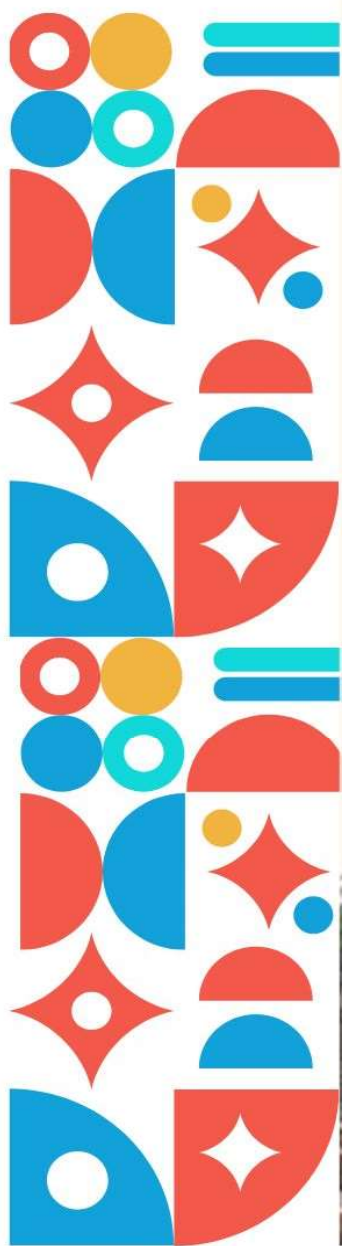


RENCANA KERJA *PERUBAHAN*

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNya kepada kita sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan **“RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) Tahun 2025”**.

RENJA Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026. RENJA Perubahan Tahun 2025 ini merupakan acuan untuk perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2025 ini. Kami menyadari RENJA ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan dalam penyusunan RENJA Perubahan selanjutnya. Akhirnya semoga RENJA Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, Juli 2025

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



Des. M. HANKAM INDORO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670929 199202 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	12
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB	12
2.2 Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	15
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	59
3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja PD	59
3.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	64
3.3 Pendanaan.....	67
BAB V PENUTUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA Perubahan PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mewajibkan setiap PD untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Perubahan PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses penyusunan RENJA Perubahan PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun P-RKPD dan RENJA Perubahan PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan RENJA Perubahan PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RENJA Perubahan PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan RENJA Perubahan PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam P-RKPD. Oleh karena itu penyusunan RENJA Perubahan PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan P-RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan RENJA Perubahan PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Selanjutnya Kepala Perangkat

[illegible]

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas P3APKB Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang mengampu 2 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayan publik, maka diperlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara vertikal dan horisontal maupun hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

RENJA Perubahan PD Tahun 2025 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 dengan mengacu kepada tema, prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. RENJA Perubahan PD Tahun 2025 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RENJA Perubahan PD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 96/E);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
22. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
23. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
25. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
28. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
29. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

30. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
31. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
32. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
34. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
35. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ daerah;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
38. Peraturan Presiden RI Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RRPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;

42. Perda Kab.Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Blitar tahun 2021-2026;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
44. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021- 2026;
45. Peraturan Bupati Blitar Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar;
46. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RENJA Perubahan PD Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini disusun dengan menyesuaikan tujuan dan fungsi Dinas P3APPKB. Maka tujuan disusunnya RENJA Perubahan PD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 atau sumber dana lainnya. Menempatkan sasaran program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas aparatur Dinas P3APPKB.
2. Konsistensi dalam peningkatan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
3. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
4. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja PD.
5. Memudahkan pemantauan pelaksanaan program PD meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang

terimplementasi.

6. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Blitar.

1.4 SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN PD) Dinas P3APKB Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA PERUBAHAN PD, proses penyusunan RENJA PERUBAHAN PD, keterkaitan antara RENJA PERUBAHAN PD dengan dokumen P-RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan P-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA PERUBAHAN PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA PERUBAHAN PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum memiliki tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standart pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.2. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi PD Berisi uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan I dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi 10 faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERNGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Pendanaan dan Rencana Kerja dari lampiran Renja.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, yaitu :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian kinerja pelayanan PD dapat diukur dengan menggunakan dasar Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan pada Renstra PD. Adapun data pencapaian kinerja pelayanan PD dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2024	2025	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
1	Indeks Pemberdayaan Gender	80,25	80,05	78,95	80,05	80,15	80,25	81,32	81,82	81,82	81,33	Realisasi melebihi target
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,95	-	3,65	3,75	3,85	3,95	4,8	3,75	3,75	3,85	Realisasi sesuai target
3	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	31,45	-	30,65	31,05	31,30	31,45	27,31	31,05	31,05	31,30	Realisasi belum sesuai target
4	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	88,25	-	87,76	87,95	88,15	88,25	52,25	57,41	57,41	88,15	Realisasi belum sesuai target
5	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100	93,15	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi sesuai target

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2024	2025	
6	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan	98,80	-	92,10	93,35	95,70	98,80	100	100	100	100	Realisasi melebihi target
7	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	94,00	-	90,62	92,00	93,00	94,0	100	100	100	100	Realisasi melebihi target
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	-	2	2	2	2	1,98	1,99	1,99	2	Realisasi belum sesuai target
9	Rasio akseptor KB	14,19	-	14,16	14,17	14,18	14,19	15,14	15,64	15,64	15,67	Realisasi melebihi target
10	Indeks Pembangunan Keluarga (I bangga)	61,00	-	51,58	51,97	52,42	52,66	61,15	62	62,0	62,03	Realisasi melebihi target

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar

Pelaksanaan kegiatan di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan melebihi target antara lain karena:

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah 14 tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
2. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
5. Adanya dukungan dan komitmen dari mitra kerja dan Dinas instansi terkait untuk mendukung program dari Dinas P3APPKB baik yang terkait pengendalian penduduk, KB serta mendukung pencapaian sasaran MDGs.
6. Adanya dukungan dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sehingga komitmen pemerintah terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga semakin tinggi untuk revitalisasi ProgramKB.

2.2 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar sampai pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan penurunan jumlah penduduk.

Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan bahwa untuk urusan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

adalah merumuskan kebijakan teknis.

Kabupaten Blitar dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPPA Republik Indonesia
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas P3AK dan BKKBN Propinsi Jawa Timur
4. Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, tentunya banyak permasalahan yang dihadapi baik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; dan Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
2. Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar. Pada tahun sebanyak 61 kasus kekerasan dialami oleh perempuan dan pada anak sebanyak 89 kasus.
3. Walaupun telah mengalami penurunan angka permohonan rekomendasi perkawinan anak, namun angka pengajuan perkawinan anak masih cukup tinggi.
4. Kerja sama dengan Swasta terkait optimalisasi peran APSAI (Asosiasi Persatuan Sahabat Anak Indonesia) belum mencapai titik optimal.

5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024.
6. Masih belum seluruh Desa di Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia tangguh.
7. Masih belum seluruh sekolah dapat ditetapkan menjadi sekolah siaga kependudukan.

Dengan melihat isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka dapat dilakukan penyusunan strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kuantitas maupun kualitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Strategi ini dilakukan melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.
3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia khususnya kaum wanita melalui pendidikan bimtek dan sosialisasi, seperti di kelompok PKK, GOW Fatayat, Aisyah dan Muslimat.
4. Meningkatkan advokasi dan promosi serta sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat mengenali kategori, menangani hingga melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan meningkatkan peran dan kompetensi satuan tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.
5. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua atau wali tentang penyadaran hukum terhadap peran perempuan dan hak-hak anak serta memberikan pelayanan maksimal secara kuantitatif & kualitatif kepada perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

6. Meningkatkan sosialisasi bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat bersama sama menekan terjadinya perkawinan anak atas dasar alasan apapun.
7. Optimalisasi Advokasi bersama swasta khususnya perusahaan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan hak anak minimal di dalam lingkungan perusahaan masing masing.
8. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui pembinaan serta evaluasi kecamatan, desa, kelurahan layak anak. Mengikutkan forum anak dalam musrenbang juga musrendes. Merangkul semua pihak baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk semua kegiatan harus responsif anak.
9. Optimalisasi pembinaan terhadap petugas lapangan dalam rangka mendapatkan data yang valid melalui pendataan keluarga dari rumah ke rumah. Strategi ini sangat perlu dilakukan karena tingkat kesadaran dan kemampuan dari petugas lapangan dalam hal ini kader di desa masih tergolong rendah. Salah satu diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan kader untuk menerapkan pengumpulan data yang benar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas P3APKB adalah melalui peningkatan pembinaan terhadap PLKB serta melibatkan PPKBD dan kader untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pendataan keluarga, melalui pelatihan dan sosialisasi.
10. Meningkatkan kualitas petugas lapangan melalui bimbingan dan pembinaan secara berkala kaitannya dengan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
11. Melakukan advokasi kepada desa untuk menganggarkan guna memfasilitasi kegiatan sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia Tangguh
12. Kedepannya akan bekerjasama dan melakukan advokasi Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar untuk dapat memasukkan isue kependudukan sebagai salah satu muatan local Pendidikan.

Program di Dinas P3APKB Kabupaten Blitar berusaha dilaksanakan sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Blitar, Provinsi maupun Nasional di antaranya dengan cara:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan menguatkan 17 kapasitas SDM melalui Bimtek dan Pelatihan, meningkatkan kinerja kelembagaan melalui pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kapasitas aparatur, mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja.
- b. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya, Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat, meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan, memperkuat lembaga/jejaring PUG.
- c. Program Perlindungan Perempuan bertujuan memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat sipil dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan dengan tujuan pembentukan dan pengoptimalan standar layanan PUSPAGA dalam meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.
- e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak bertujuan melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender.
- f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) bertujuan menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. Melakukan

pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. Meningkatkan 18 kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatandata pemenuhan hak anak.

- g. Program Perlindungan Khusus Anak memiliki tujuan meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
- h. Program Pengendalian Penduduk dilakukan penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk dengan memanfaatkan jejaring yang ada baik dari institusi masyarakat , dinas terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama maupun lintas sektor.
- i. Program Pembinaan Keluarga Berencana telah dilaksanakan dengan memanfaatkan jejaring yang ada baik dari institusi masyarakat, Dinas terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama maupun lintas sektor. Selanjutnya, untuk menggemakan kembali Program KB di masyarakat, maka seperti tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan beberapa kegiatan pada 248 Kampung KB yang ada di seluruh kecamatan diantaranya Pembentukan Pokja Kampung KB, Pertemuan Forum Kampung KB, Lokakarya Mini, Kegiatan Tribina, Operasional Penyuluhan KB, serta Rapat Teknis. Pertemuan tersebut membahas mengenai kegiatan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan pembangunan lainnya di Kampung KB, rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan-kegiatan di kampung KB, identifikasi permasalahan dan upaya mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi Kampung KB, Peningkatan Kualitas dan Strata kelompok Kegiatan TRIBINA, serta evaluasi pelaksanaan Program KKBPK yang dilaksanakan di 19 balai Penyuluhan KB. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh ketersediaan Balai Penyuluh KB.
- j. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

merupakan optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota terdapat 5 (lima) kegiatan dengan indikator program rata-rata tingkat capaian kinerja sampai dengan triwulan II belum terdapat realisasi dikarenakan beberapa kegiatan masih dalam proses pencairan dan rencana penyerapan anggaran pada triwulan II.

▪ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdapat 2 (dua) kegiatan di dalamnya. Indikator pada program ini yang pertama yakni Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD dengan target kinerja yaitu 71,65%. Indikator kedua yaitu Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dengan target kinerja sebesar 3,85% dan indikator yang ketiga Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dengan target indikator sebesar 31,3%. Program ini masih proses pencairan dan rencana penyerapan anggaran pada triwulan III kami positif dapat mencapai hasil maksimal pada akhir periode anggaran.

- **Program Perlindungan Perempuan**

Dengan indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk) target 6,02 dalam proses pencairan dan rencana penyerapan anggaran pada triwulan III kami positif dapat mencapai hasil maksimal pada akhir periode anggaran.

- **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Dengan indikator Cakupan Keluarga Berkualitas yang memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak target 16% dalam proses pencairan dan rencana penyerapan anggaran pada triwulan III kami positif dapat mencapai hasil maksimal pada akhir periode anggaran.

- **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Dengan indikator Presentase Data Sektoral Terpilah yang Valid target 100% dalam proses pencairan dan rencana penyerapan anggaran pada triwulan III dan IV kami positif dapat mencapai hasil maksimal pada akhir periode anggaran.

- **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Kategori KLA dengan target Nindya belum dapat di capai karena masih dalam proses penilaian dan penentuan nilai predikat atau kategori, baru akan dilaksanakan sekitar bulan Juli-Agustus 2025).

- **Program Pengendalian Penduduk**

Median Usia kawin Pertama merupakan indikator yang dalam penghitungannya dilakukan pada akhir tahun dengan target kinerja 20,6 sehingga pada Triwulan II ini belum dapat di tentukan realisasinya.

- **Program Pembinaan Keluarga Berencana**

Program Pembinaan Keluarga Berencana yang sebagian besar anggarannya dibiayai oleh Dana lokasi Khusus (DAK) dengan indikator yang pertama adalah persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmetneed*) sampai dengan triwulan II

Tahun 2024 ini Unmetneed mencapai angka 8,6 dari target 7,89, maka dilakukanlah penyepakatan target perubahan untuk tahun 2024 menjadi 13,06 sesuai dengan perjanjian kerjasama 21 dengan BKKBN. Indikator yang kedua yaitu Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR/*Age Spesific Fertility Rate*) dengan target kinerja 9,24.

▪ **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program dengan Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) adalah indeks yang dirilis setiap tahun oleh BKKBN untuk seluruh Kabupaten dan Kota dengan target 62,0 maka belum dapat diperoleh realisasinya pada Triwulan II. Data rilis pada awal tahun N+1.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Adanya kerjasama dan hubungan baik intern maupun lintas sektor, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Adanya kerjasama dan hubungan baik intern maupun lintas sektor, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a) Masih kurangnya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja tidak dapat dicapai sesuai harapan.
- b) Adanya keterlambatan dana DAK dari pusat yang turun ke daerah.
- c) Kurangnya Sumber Daya Manusia (staf) dalam membantu tugas bidang yang ada dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah memenuhi target, maka adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan. Namun, apabila program dan kegiatan belum memenuhi target maka akan menimbulkan permasalahan secara langsung maupun tidak langsung pada Program/Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas pokok dan fungsi sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan Pagu Anggaran.
- b) Penyesuaian kebijakan keuangan daerah dengan perubahan belanja, dan pembiayaan daerah serta adanya pergeseran prioritas pembangunan dengan adanya Pemilihan Umum serentak pada Tahun 2024.

Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 melaksanakan 10 (Sepuluh) program, 24 Kegiatan dan 46 Sub. Kegiatan secara rinci diuraikan sebagai berikut:

▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

▪ **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

- 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
 - b. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
- 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

▪ **Program Perlindungan Perempuan**

- 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup

Daerah Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

▪ **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

▪ **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

1. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

▪ **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

▪ **Program Perlindungan Khusus Anak**

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
2. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - b. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota.

▪ **Program Pengendalian Penduduk**

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana

▪ **Program Pembinaan Keluarga Berencana**

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Seusai Kearifan Budaya Lokal.
 - a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
 - b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - d. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan Kb Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

▪ **Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Lingkup
Kabupaten Blitar Periode Pelaksanaan Semester I Tahun 2025

Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100 % Rp=14			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	3.692.003.541,00	100	7.420.643.090,00	100	4.199.858.793,00	24,49	1.142.758.231,00	50	2.409.264.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	3.552.022.847,00	50,00	84,57	50	10.972.665.937,00	50,00	50,00	10.972.665.937,00	Dinas P3AP PKB
2	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran	100	3.005.896,00	100	3.686.095,00	100	1.554.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		3.686.095,00	0,00	122,63	3.686.095,00	Dinas P3AP PKB

		Kinerja Perangkat Daerah	ran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan																							
3	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.619.832,00	5	2.169.895,00	2	1.068.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.00	0,00	5	2.169.895,00	250.00	133,96	2.169.895,00	Dinas P3AP PKB		
4	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1.386.064,00	2	1.516.200,00	1	486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.00	0,00	2	1.516.200,00	200.00	109,39	1.516.200,00	Dinas P3AP PKB		
5	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	3.315.417.303,00	100	5.860.964.078,00	100	3.345.753.396,00	955.742.332,00	2.079.615.149,00	0,00	0,00	100	3.035.357.481,00	100.00	90,72	100	8.896.321.559,00	100.00	268,33	8.896.321.559,00	Dinas P3AP PKB			
6	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	24	3.280.422.983,00	97	5.815.273.328,00	24	3.327.182.896,00	955.742.332,00	2.069.950.149,00	0,00	0,00	48	3.025.692.481,00	604.17	90,94	145	8.840.965.809,00	604.17	269,51	8.840.965.809,00	Dinas P3AP PKB			

		gan ASN	Tunjang an ASN																								
7	X.XX. 01.2. 02.00 03	Pelak sanaan Penata usaha an dan Penguji an/Veri fikasi Keuang an SKPD	Jumlah Dokume n Penata sahaan dan Penguji an/Verifik asi Keuanga n SKPD	1	34.305. 509,00	97	44.340. 000,00	60	17.760. 000,00		0,00	18	8.880.0 00,00	0,0 0		0,0 0	18	8.880.0 00,00	115 00.0 0	50, 00	115	53.220. 000,00	115 00.0 0	155 ,14	53.220. 000,00		Dinas P3AP PKB
8	X.XX. 01.2. 02.00 05	Koor dinasi dan Penyus unan Lapora n Keuang an Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	1 2	688.81 1,00	1	1.350.7 50,00	1	810.50 0,00		0,00		785.00 0,00	0,0 0		0,0 0		785.00 0,00	8.33	96, 85	1	2.135.7 50,00	8.33	310 ,06	2.135.7 50,00		Dinas P3AP PKB
9	X.XX .01.2 .06	Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Persent ase Adminis trasi Umum yang Dilaksan akan secara Akuntab el	1 0 0	107.35 6.369, 00	10 0	431.12 0.559, 00	80	57.703 .053,0 0	1 00	8.801. 000,00	10 0	18.228 .000,0 0	0,0 0		0,0 0	10 0	27.029 .000,0 0	100. 00	46, 84	100 .00	458.14 9.559, 00	100. 00	426 ,76	458.14 9.559, 00		Dinas P3AP PKB

10	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	29.735.091,00	21	238.433.900,00	8	12.577.150,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	60.00	0,00	21	238.433.900,00	60.00	801,86	238.433.900,00	Dinas P3AP PKB
11	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4120	7.924.145,00	1	16.430.200,00	1	4.634.750,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0.02	0,00	1	16.430.200,00	0.02	207,34	16.430.200,00	Dinas P3AP PKB
12	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	69.697.133,00	89	176.256.459,00	70	40.491.153,00	5	8.801.000,00	15	18.228.000,00	0,00		0,00	20	27.029.000,00	121.11	66,75	109	203.285.459,00	121.11	291,67	203.285.459,00	Dinas P3AP PKB
13	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat Sasaran	100	0,00	100	0,00	80	175.000.000,00	32	56.000.000,00		98.000.000,00	0,00		0,00	32	154.000.000,00	32.00	88,00	32	154.000.000,00	32.00		154.000.000,00	Dinas P3AP PKB

14	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0,00	0,00	1	175.000.000,00	1	56.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	1	154.000.000,00	Infinity	88,00	1	154.000.000,00	Infinity	154.000.000,00	Dinas P3AP PKB		
15	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	80	211.524.245,00	80	1.004.261.322,00	80	537.917.644,00	20	117.668.399,00	198.552.967,00	0,00	0,00	20	316.221.366,00	25,00	58,79	20	1.320.482.688,00	25,00	624,27	1.320.482.688,00	Dinas P3AP PKB
16	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	70.385.440,00	15	97.913.322,00	12	75.749.644,00	3	13.145.399,00	23.085.967,00	0,00	0,00	3	36.231.366,00	15,00	47,83	18	134.144.688,00	150,00	190,59	134.144.688,00	Dinas P3AP PKB
17	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	141.138.805,00	24	906.348.000,00	12	462.168.000,00	3	104.523.000,00	175.467.000,00	0,00	0,00	6	279.990.000,00	27,273	60,58	30	1.186.338.000,00	272,73	840,55	1.186.338.000,00	Dinas P3AP PKB

18	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80	54.699.728,00	80	120.611.036,00	80	81.930.000,00	80	4.546.500,00	80	14.868.500,00	0,00	0,00	80	19.415.000,00	100.00	23,70	80.00	140.026.036,00	100.00	255,99	140.026.036,00	Dinas P3AP PKB
19	X.XX.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	37.817.096,00	6	105.628.636,00	6	73.880.000,00		3.250.000,00		13.572.000,00	0,00	0,00		16.822.000,00	54.55	22,77	6	122.450.636,00	54.55	323,80	122.450.636,00	Dinas P3AP PKB
20	X.XX.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	16.882.632,00	6	14.982.400,00	6	8.050.000,00	1	1.296.500,00		1.296.500,00	0,00	0,00	1	2.593.000,00	58.33	32,21	7	17.575.400,00	58.33	104,10	17.575.400,00	Dinas P3AP PKB

		atau Lapang an																									
2 1	2.08.0 2	PROGR AM PENG RUSUT AMAAN GENDE R DAN PEMBE RDAYA AN PEREM PUAN	- Persenta se ARG pada Belanja Langsun g APBD - Persenta se Partisipa si Perempu an di Lembaga Pemerint ah - Persenta se Partisipa si Perempu an di Lembaga Swasta	7 1, 0 5 3, 9 5 3 1, 4 5	1.306.2 45.670, 00	1.143.1 59.945, 00	70,6 5 3,85 31,3	484.495 .444,00	0 0 0	7.500.0 00,00	0 0 0	9.000.0 00,00	0 0 0	0,0 0	0 0 0	0,0 0	0 0 0	16.500. 000,00		3,41	NaN NaN NaN	1.159.65 9.945,00	NaN NaN NaN		1.159.6 59.945, 00	Dinas P3AP PKB	
2 2	2.08.0 2.2.01	Pelemb agaan Pengar usutam aan Gender (PUG) pada Lembag a Pemer intah Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Persenta se SKPD Dengan Dokume n PPRG	1 0 0	867.297 .234,00	1 00	164.915 .365,00	9 5	189.470 .444,00	0,00		9.000.0 00,00	0,0 0	0,0 0	10 0	9.000.0 00,00	100. 00	4,75	1 00	173.915. 365,00	100. 00	20,0 5	173.915 .365,00	Dinas P3AP PKB			

2 3	2.08.0 2.2.01 .0006	Advokas i Kebijaka n dan Pendamp ingan Penyele nggaraa n PUG kewena ngan Kab/Kot a	Jumlah SDM yangmem peroleh advokasi Kebijakan dan Pendamp ingan Penyelen ggaraan PUG	2 7 4	495.223 .876,00	5 4	118.915 .365,00	1 59	149.470 .444,00		0,00		9.000.0 00,00	0,0 0	0,0 0		9.000.0 00,00	19.7 1	6,02	5 4	127.915. 365,00	19.7 1	25,8 3	127.915 .365,00	Dinas P3AP PKB
2 4	2.08.0 2.2.01 .0008	Sosialis asi kebijaka n penyele nggaraa n PUG kewena ngan Kab/Kot a	Jumlah peserta sosialisas i kebijakan penyelen ggaraan PUG tingkat Kab/Kota	2 3 0	372.073 .358,00	1 50	46.000. 000,00	1 50	40.000. 000,00		0,00		0,00	0,0 0	0,0 0		0,00	65.2 2	0,00	1 50	46.000.0 00,00	65.2 2	12,3 6	46.000. 000,00	Dinas P3AP PKB
2 5	2.08.0 2.2.02	Pember dayaan Peremp uan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekono mi pada Organis asi Kemasy arakata n Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Jumlah Perempu an yang Mengikut i Worksho p Pemberd ayaan Perempu an Bidang Sospol dan Ekonomi pada Organisa si Kemasya rakatan	1 6 0 0	438.948 .436,00	220 0	978.244 .580,00	3 20	295.025 .000,00		7.500.0 00,00		0,00	0,0 0	0,0 0		7.500.0 00,00	0.00	2,54		985.744. 580,00	0.00	224, 57	985.744 .580,00	Dinas P3AP PKB
2 6	2.08.0 2.2.02 .0001	Sosialis asi Peningk atan Partisip	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisa si	1 6 0 0	438.948 .436,00	5	978.244 .580,00	4	295.025 .000,00	1	7.500.0 00,00		0,00	0,0 0	0,0 0	1	7.500.0 00,00	0.38	2,54	6	985.744. 580,00	0.38	224, 57	985.744 .580,00	Dinas P3AP PKB

		asi Peremp uan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom i	Peningkat an Partisipas i Perempu an di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenan gan Kabupate n/Kota																							
27	2.08.03	PROGR AM PERLIN DUNGA N PEREM PUAN	Rasio Kekerasa n Terhada p Perempu an Termasu k TPPO (per 100.000 Pendudu k)	6, 0 1	269.686 .011,00	12, 44	428.811 .045,00	6,02	167.614 .700,00	1,0 2	0,00		11.156. 763,00	0,0 0		0,0 0	1	11.156. 763,00	216. 67	6,66	13	439.967. 808,00	216. 67	216, 67	439.967 .808,00	Dinas P3AP PKB
28	2.08.03.2.01	Penceg ahan Kekera san Terhad ap Peremp uan Lingku p Daerah Kabupa ten/Kot a	Prosent ase Korban Kekerasa n Terhada p Perempu an Terlayani		0,00		147.513 .400,00	92	50.750. 000,00	14	0,00		0,00	0,0 0		0,0 0	1 4	0,00	Infinit y	0,00	14	147.513. 400,00	Infinit y		147.513 .400,00	Dinas P3AP PKB
29	2.08.03.2.01.0001	Koordin asi dan Sinkroni sasi Pelaksa naan Kebijaka	Jumlah Dokumen Hasil Koordina si dan Sinkronis asi		0,00	2	147.513 .400,00	4	50.750. 000,00		0,00		0,00	0,0 0		0,0 0		0,00	Infinit y	0,00	2	147.513. 400,00	Infinit y		147.513 .400,00	Dinas P3AP PKB

		n, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kebijakan , Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																							
30	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan	98,8	150.780.926,00	66,66	87.103.445,00	100	66.417.200,00	5	0,00	3	9.131.763,00	0,00	0,00	3	9.131.763,00	3.06	13,75	3	96.235.208,00	3.06	63,82	96.235.208,00	Dinas P3AP PKB	
31	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan	17	150.780.926,00	87	87.103.445,00	26	66.417.200,00	5	0,00		9.131.763,00	0,00	0,00	5	9.131.763,00	541.18	13,75	92	96.235.208,00	541.18	63,82	96.235.208,00	Dinas P3AP PKB	

		Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																							
3 2	2.08.0 3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	118.905.085,00	14,91	194.194.200,00	14,91	50.447.500,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0.00	4,01	196.219.200,00	0.00	165,02	196.219.200,00					Dinas P3AP PKB	
3 3	2.08.0 3.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyediaan Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat		0,00		0,00	150	34.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					Dinas P3AP PKB	

		Kewena ngan Kabupat en/Kota	Peningkat an Kapasitas																								
3 4	2.08.0 3.2.03 .0004	Penguat an Jejaring antar Lembag a Penyedi a Layanan Perlindu ngan Peremp uan Kewena ngan Kabupat en/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguata n Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindun gan Perempu an Kewenan gan Kabupate n/Kota	3	118.905 .085,00	4	194.194 .200,00	5	15.937. 500,00	0,00	2.025.0 00,00	0,0 0	0,0 0	2.025.0 00,00	133. 33	12,7 1	4	196.219. 200,00	133. 33	165, 02	196.219 .200,00	Dinas P3AP PKB					
3 5	2.08.0 4	PROGR AM PENING KATAN KUALIT AS KELUA RGA	Cakupan Keluarga Berkualit as yang Memenu hi Kriteria Kesetara an Gender dan Pemenu han Hak Anak	1 8	0,00	31, 42	0,00	16	12.000. 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	172. 22	0,00	31	0,00	172. 22	172, 22	0,00	Dinas P3AP PKB					
3 6	2.08.0 4.2.01	Pening katan Kualita s Keluarg a dalam Mewuju dkan Kesetar aan Gender (KG) dan	Jumlah Keluarga yang Mendapa tкан Edukasi Penyulu han tentang KG dan Perlindu ngan Anak,	4 2 5 0	0,00	533 3	0,00	850	12.000. 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0.00	0,00		0,00	0.00	0,00	Dinas P3AP PKB						

		Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perkawinan Anak, Pengaturan Ekonomi Keluarga																							
37	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0,00		0,00	5	12.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		Dinas P3AP PKB
38	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid	100	1.102.085.966,00	200	54.144.800,00	100	13.114.006,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.00	0,00	200	54.144.800,00	200.00	200,00		54.144.800,00		Dinas P3AP PKB
39	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid	100	1.102.085.966,00	200	54.144.800,00	100	13.114.006,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00		54.144.800,00	0.00	4,91		54.144.800,00		Dinas P3AP PKB

		Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																								
40	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	8	1.102.085.966,00	2	54.144.800,00	1	13.114.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.00	0,00	2	54.144.800,00	25.00	4,91	54.144.800,00		Dinas P3AP PKB	
41	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori KLA	100	302.030.289,00	100	322.792.188,00	Nindya	3.142.500,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	100.00	16,71	100	323.317.188,00	100.00	100,00	323.317.188,00		Dinas P3AP PKB			
42	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA	100	302.030.289,00	200	322.792.188,00	100	3.142.500,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0.00	16,71		323.317.188,00	0.00	107,05	323.317.188,00		Dinas P3AP PKB			
43	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	20	302.030.289,00	20	322.792.188,00	5	3.142.500,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	100.00	16,71	20	323.317.188,00	100.00	107,05	323.317.188,00		Dinas P3AP PKB			

		han Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																								
44	2.08.07	PROGR AM PERLIN DUNGA N KHUSU S ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100	430.047.124,00	100	287.450.384,00	92	356.166.800,00	100	16.980.600,00		60.275.533,00		0,00		0,00	100	77.256.133,00	100.00	21,69	100	364.706.517,00	100.00	100,00	364.706.517,00	Dinas P3AP PKB
45	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		0,00		58.998.750,00	92	50.750.000,00	14	0,00		12.918.000,00		0,00		0,00	14	12.918.000,00	Infinity	25,45	14	71.916.750,00	Infinity		71.916.750,00	Dinas P3AP PKB
46	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan		0,00		58.998.750,00	150	50.750.000,00		0,00		12.918.000,00		0,00		0,00		12.918.000,00		25,45		71.916.750,00			71.916.750,00	Dinas P3AP PKB

		pencegahan KTA	pencegahan KTA																								
47	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten	100	430.047.124,00		196.163.414,00	92	166.581.800,00	14	16.980.600,00		42.857.533,00		0,00		0,00	14	59.838.133,00	14.00	35,92	14	256.001.547,00	14.00	59,53	256.001.547,00	Dinas P3AP PKB
48	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	70	430.047.124,00	89	196.163.414,00	76	166.581.800,00	14	16.980.600,00		42.857.533,00		0,00		0,00	14	59.838.133,00	147.14	35,92	103	256.001.547,00	147.14	59,53	256.001.547,00	Dinas P3AP PKB
49	2.08.07.2.03	Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Lembaga Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah	100	0,00	12,09	32.288.220,00	14,91	138.835.000,00		0,00		4.500.000,00		0,00		0,00		4.500.000,00	0.00	3,24		36.788.20,00	0.00		36.788.220,00	Dinas P3AP PKB

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terstand arisasi																							
50	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		0,00	32.288.220,00	30	34.510.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		32.288.220,00				32.288.220,00	Dinas P3AP PKB	
51	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		0,00	0,00	5	104.325.000,00		0,00		4.500.000,00	0,00		0,00		4.500.000,00	4,31		4.500.000,00				4.500.000,00	Dinas P3AP PKB	
52	2.14.02	PROGR AM PENGE NDALIA N PENDU DUK	Median Usia Kawin Pertama	21	9.004.070,00	21,03	940.583.513,00	20,6	633.240.000,00		0,00		81.498.770,00	0,00		0,00		81.498.770,00	100.00	12,87	21	1.022.082.283,00	100.00	100,00	1.022.082.283,00	Dinas P3AP PKB

53	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	2	9.004.070,00	5	63.123.400,00	1	101.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.123.400,00	0.00	701,05	63.123.400,00	Dinas P3AP PKB
54	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	9.004.070,00	1	63.123.400,00	1	101.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00	0,00	1	63.123.400,00	20.00	701,05	63.123.400,00	Dinas P3AP PKB
55	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupa	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian	10	0,00	2	877.460.113,00	2	531.600.000,00	0,00	81.498.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.498.770,00	0.00	15,33		958.958.883,00	0.00		958.958.883,00	Dinas P3AP PKB

		n Daerah Kabupa ten/Kot a	Pendudu k Cakupan Daerah Kabupat en/Kota yang Tersusu n dan Valid																							
5 6	2.14.0 2.2.02 .0012	Penca tatan dan Pengum pulan Data Keluarg a	Jumlah Laporan Pencatat an dan Pengump ulan Data Keluarga		0,00	1	532.800 .000,00	22	207.600 .000,00		0,00		0,00	0,0 0		0,0 0		0,00	Infinit y	0,00	1	532.800. 000,00	Infini ty		532.800 .000,00	Dinas P3AP PKB
5 7	2.14.0 2.2.02 .0013	Peng olahan dan Pelapor an Data Pengen dalian Lapang an dan Pelayan an KB	Jumlah Dokumen Pengolah an dan Pelapora n Data Pengend alian Lapangan dan Pelayana n KB		0,00	124	344.660 .113,00	22	264.000 .000,00		0,00	3	70.173. 770,00	0,0 0		0,0 0	3	70.173. 770,00	Infinit y	26,5 8	127	414.833. 883,00	Infini ty		414.833 .883,00	Dinas P3AP PKB
5 8	2.14.0 2.2.02 .0018	Pembi naan dan Pengaw asan Pencata tan dan Pelapor an Program Bangga Kencan a	Jumlah Laporan hasil Pelaksan aan Pembina an dan pengawa san Program Bangga Kencana		0,00		0,00	1	60.000. 000,00		0,00	1	11.325. 000,00	0,0 0		0,0 0	1	11.325. 000,00	Infinit y	18,8 8	1	11.325.0 00,00	Infini ty		11.325. 000,00	Dinas P3AP PKB
5 9	2.14.0 3	PROGR AM PEMBI NAAN KELUA RGA BEREN	ASFR Unmetne ed	8, 2 6 7, 2 4	2.301.8 22.465, 00	18, 7 8,6	8.096.5 03.250, 00	9,24 8,0	7.923.3 37.000, 00	0 0	0,00	0 0	1.206.8 39.410, 00	0 0	0,0 0	0 0	0 0	1.206.8 39.410, 00	0.00	15,2 3	0 0	9.303.34 2.660,00	0.00 0.00	0,00	9.303.3 42.660, 00	Dinas P3AP PKB

		CANA (KB)																									
60	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penguatalan Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10	393.928.084,00	20	1.069.365.760,00	10	2.019.000.000,00	0,00	333.585.810,00	0,00	0,00	333.585.810,00	0.00	16,52	1.402.951.570,00	0.00	356,14	1.402.951.570,00	Dinas P3AP PKB						
61	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		0,00		0,00	2	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Dinas P3AP PKB						
62	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh an Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependu	22	393.928.084,00	30	287.997.560,00	22	1.174.000.000,00	0,00	333.585.810,00	0,00	0,00	333.585.810,00	236.36	28,41	52	621.583.370,00	236.36	157,79	621.583.370,00	Dinas P3AP PKB					

			dukan, dan Keluarga Berencan a)																									
6 3	2.14.0 3.2.01 .0011	Pelak sanaan Mekanis me Operasi onal Program Bangga Kencan a melalui Rapat Koordin asi Kecama tan (Rakor am), Rapat Koordin asi Desa (Rakord es), dan Mini Lokakar ya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanis me Operasio nal Program Bangga Kencana (Pemban gunan Keluarga, Kependu dukan, dan Keluarga Berencan a) Melalui Rapat Koordina si Kecamat an (Rakorca m), Rapat Koordina si Desa (Rakorde s), dan Mini Lokakary a (Minilok)		0,00	10	658.088 .200,00	4	330.000 .000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	Infinit y	0,00	10	658.088. 200,00	Infinit y		658.088 .200,00						Dinas P3AP PKB	
6 4	2.14.0 3.2.01 .0013	Komu nikasi, Informa si dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencan a sesuai Kearifan	Jumlah Komunika si, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pemban gunan		0,00	4	68.019. 000,00	2	125.000 .000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	Infinit y	0,00	4	68.019.0 00,00	Infinit y		68.019. 000,00						Dinas P3AP PKB	

		Budaya Lokal	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan																							
65	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		0,00	14	55.261.000,00	10	250.000.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Infinitif	0,00	14	55.261.000,00	Infinitif		55.261.000,00	Dinas P3AP PKB
66	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam	100	551.499.316,00	300	1.178.000.000,00	80	744.000.000,00	0,00		148.800.000,00		0,00		0,00		148.800.000,00	0.00	20,00		1.326.800.000,00	0.00	240,58	1.326.800.000,00	Dinas P3AP PKB

			Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)																								
67	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3720	551.499.316,00	1488	1.178.000.000,00	248	744.000.000,00	0,00	248	148.800.000,00	0,00		0,00	248	148.800.000,00	46.67	20,00	1736	1.326.800.000,00	46.67	240,58	1.326.800.000,00		Dinas P3AP PKB	
68	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	1000	1.006.586.927,00	100	4.776.820.190,00	100	4.454.737.000,00	0,00		724.453.600,00	0,00		0,00		724.453.600,00	0.00	16,26		5.501.273.790,00	0.00	546,53	5.501.273.790,00		Dinas P3AP PKB	

69	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	200.017.322,00	24	57.494.790,00	12	44.100.000,00	0,00	6.955.200,00	0,00	0,00	6.955.200,00	200.00	15,77	24	64.449.990,00	200.00	32,22	64.449.990,00	Dinas P3AP PKB		
70	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35	727.952.815,00	23221	4.691.326.700,00	7814	3.166.117.000,00	0,00	2791	711.239.000,00	0,00	0,00	2791	711.239.000,00	74320.00	22,46	26012	5.402.565.700,00	74320.00	742,16	5.402.565.700,00	Dinas P3AP PKB
71	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		0,00		0,00	22	1.199.970.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	Dinas P3AP PKB
72	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan	1	78.616.790,00	4	27.998.700,00	2	35.550.000,00	0,00	1	6.259.400,00	0,00	0,00	1	6.259.400,00	500.00	17,61	5	34.258.100,00	500.00	43,58	34.258.100,00	Dinas P3AP PKB

		Berenca na dan Kesehat an Reprodu ksi di Fasilitas Kesehat an Termas uk Jaringan dan Jejaring nya	n Keluarg a Berenc an dan Kesehat an Reproduk si di Fasilitas Kesehat an Termasuk Jaringan dan Jejaringn ya																							
7 3	2.14.0 3.2.03 .0016	Prom osi dan Konselin g KB Pasca Persalin an	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalina n		0,00		0,00	70	9.000.0 00,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00							0,00		Dinas P3AP PKB	
7 4	2.14.0 3.2.04	Pember dayaan dan Pening katan Peran Serta Organis asi Kemasy arakata n Tingkat Daerah Kabupa ten/Kot a dalam Pelaksa naan Pelayan an dan Pembina an Keserta	Persenta se Organisa si Kemasya rakatan Tingkat Daerah Kabupat en/Kota dalam Pelaksana an Pelayana n dan Pembina an Kesertaa n Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	8 0	349.808 .138,00	160	1.072.3 17.300, 00	80	705.600 .000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0.00	0,00				1.072.31 7.300,00	0.00	306, 54	1.072.3 17.300, 00	Dinas P3AP PKB		

		an Ber-KB																								
75	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	37	349.808.138,00	285	1.072.317.300,00	248	705.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.27	0,00	285	1.072.317.300,00	770.27	306,54	1.072.317.300,00	Dinas P3AP PKB		
76	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	IPK	52,66	0,00	62	11.756.168.300,00	51,97	6.356.800.000,00	0,00	687.490.000,00	0,00	0,00	0,00	687.490.000,00	0.00	10,82		12.443.658.300,00	0.00	0,00	12.443.658.300,00	Dinas P3AP PKB			
77	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan	100	0,00	164	11.756.168.300,00	84	6.356.800.000,00	0,00	687.490.000,00	0,00	0,00	0,00	687.490.000,00	0.00	10,82		12.443.658.300,00	0.00		12.443.658.300,00	Dinas P3AP PKB			

		aan Ketaha nan dan Kesejah teraan Keluarg a	Keluarga yang Aktif																									
7 8	2.14.0 4.2.01 .0008	Prom osi dan Sosialis asi Kelomp ok Kegiata n Ketahan an dan Kesejah teraan Keluarg a (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjut usiaan serta Pengelo laan Keuang an Keluarg a)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisa si Kelompok Kegiatan Ketahana n dan Kesejahte raan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencan a, Kelanjutu siaan serta Pengelola an Keuanga n Keluarga)		0,00	2 6	44.420. 000,00	2	3.000.0 00,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	Infinit y	0,00	2 6	44.420.0 00,00	Infinit y	44.420. 000,00	Dinas P3AP PKB							
7 9	2.14.0 4.2.01 .0018	Peng adaan Sarana Kelomp ok Kegiata n Ketahan an dan Kesejah teraan Keluarg	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahana n dan Kesejahte raan Keluarga (BKB, BKR,		0,00	6 2	650.140 .000,00	20	130.000 .000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	Infinit y	0,00	6 2	650.140. 000,00	Infinit y	650.140 .000,00	Dinas P3AP PKB							

		a (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia																							
80	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		0,00	5658	11.061.608.300,00	2829	6.223.800.000,00	0,00	2829	687.490.000,00	0,00		0,00	2829	687.490.000,00	Infinit y	11,05	8487	11.749.098.300,00	Infinit y		11.749.098.300,00		Dinas P3AP PKB

TOTAL	9.412.925.136,00		30.450.256.515,00		20.149.769.243,00		1.167.238.831,00		4.466.050.092,00		0,00		0,00		5.633.288.923,00		171,95		36.083.545.438,00			36.083.545.438,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Program																				93,89%	nan%		
Predikat Kinerja Program																				Sangat Tinggi			

Sumber: Dinas P3APPKB

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan telaah Kebijakan Nasional dan Provinsi, serta berpedoman pada RKPD Kabupaten Blitar 2025, maka ditetapkan tujuan strategis rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut **“Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan anak serta Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran-sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan Yang Berkualitas melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan yang berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penanganan perlindungan perempuan dan anak serta Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak (PUG & PUHA) dan pemberdayaan perempuan.
4. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan upaya peningkatan kesertaan ber KB yang berkualitas dan upaya peningkatan ketahanan keluarga.
5. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Selain itu Dinas P3APPKB juga turut serta mewujudkan keenam misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2030 yang meliputi:

- a. Misi I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas.
- b. Misi II : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana
- c. Misi III : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
- d. Misi IV : Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2025-2030 tersebut, maka Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar memiliki tugas dan fungsi serta berperan dalam mendorong tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Blitar.

Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar dari visi misi tersebut terperinci tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

VISI (RPJMD)	:	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	:	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan anak		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan dibidang politik, pendidikan dan ekonomi
			Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender	Tersedianya data terpilah gender
			Meningkatnya perlindungan perempuan	1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Tersedianya layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat Kabupaten/Kota
			Meningkatnya pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi , Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

VISI (RPJMD)	:	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	:	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Kewenangan Kabupaten/Kota dan tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
			Meningkatnya perlindungan kekerasan terhadap anak	1. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus serta pencegahan kekerasan 3. Tersedianya layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan, diskriminasi dan memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk	Terlaksananya Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan

VISI (RPJMD)	:	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	:	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Terlaksananya Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta pembentukan Rumah Data Kependudukan
			Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi, Peningkatan Pelayanan KB MKJP serta Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
			Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi pelaksanaan program di kampung KKBPK	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
				Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Terlaksananya dan meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah

VISI (RPJMD)	:	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	:	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja	Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan

3.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tema RKPD-P tahun 2025 serta program kegiatan yang telah disusun pada Perubahan Renstra PD tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyepakatan target program, kegiatan dan IKK dinas P3APKB pada tahun 2025. Penyepakatan Indikator akan disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Penetapan Target Kinerja Program Perangkat Daerah

No	Kode	Program	Indikator	Target RKPD Induk 2025	Realisasi 2024	Realisasi per 5 Juni 2025	Target P-RKPD 2025	Keterangan
1	2.08.01	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	CC	N/A	A	-
2	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	70,65	18,21	N/A	70,65	-
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3,85	4,80	N/A	3,85	-
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31,3	27,31	N/A	31,3	-
3	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)	6,01	12,44	N/A	6,01	-
4	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	16	31,42	N/A	16	-

No	Kode	Program	Indikator	Target RKPD Induk 2025	Realisasi 2024	Realisasi per 5 Juni 2025	Target P-RKPD 2025	Keterangan
5	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase Data Profil Gender dan anak yang digunakan	100	100	N/A	100	-
6	2.08.06	Program Pemenuhan Hak anak (PHA)	Kategori KLA	Utama	Nindya	N/A	Utama	-
7	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	100	100	N/A	100	-
8	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama	21	22	N/A	21	-
9	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	ASFR	9,05	32,7	N/A	9,05	-
			Unmetneed	7,89	8,6	N/A	7,89	-
10	2.08.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	52,42	62,0	N/A	52,42	-

Sumber: Dinas P3APPKB

3.3 Pendanaan

Dinas P3APPKB melaksanakan 10 program dan 24 kegiatan serta 46 sub kegiatan yang sebagian besar bersumber dari dana DAU dan DAK senilai Rp. 18.773.838.243,- diubah menjadi Rp. 18.900.799.243,-. Perubahan anggaran penyesuaian tahun 2025 akan disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Penyesuaian Perubahan Anggaran Tahun 2025

Nama Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		PAGU	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.199.858.793,00	4.199.858.793,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	100%	1.554.700,00	1.554.700,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.068.400,00	1.068.400,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	486.300,00	486.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	3.249.694.530,00	3.345.753.396,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.220.264.030,00	3.327.182.896,00

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	28.620.000,00	17.760.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	810.500,00	810.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	80%	80%	104.268.556,00	57.703.053,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	23.841.250,00	12.577.150,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	8.239.500,00	4.634.750,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	72.187.806,00	40.491.153,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	80%	80%	175,000,000.00	175,000,000.00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	175,000,000.00	175,000,000.00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	80%	80%	537.917.644,00	537.917.644,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75.749.644,00	75,749,644.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	462.168.000,00	462.168.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	80%	81.930.000,00	81.930.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	73.880.000,00	73.880.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	8.050.000,00	8.050.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.286.610.430,00	5.236.392.243,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	70,65%	70,65%	484.495.444,00	484.495.444,00
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3,85%	3,85%		
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31,3%	31,3%		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD Dengan Dokumen PPRG	95%	95%	225.921.988,00	189.470.444,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	159 Orang	159 Orang	179.921.988,00	149.470.444,00
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	150 Orang	150 Orang	46.000.000,00	40.000.000,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Sospol dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	320 Orang	320 Orang	325.000.000,00	295.025.000,00

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	325.000.000,00	295.025.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)	6,02	6,02	169.818.200,0	167.614.700,00
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Terlayani	92%	92%	50.750.000,00	50.750.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	50.750.000,00	50.750.000,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan	100%	100%	66.558.200,00	66.4172.00,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	26 Layanan	26 Layanan	66.558.200,00	66.417.200,00

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi	14,91%	14,91%	52.510.000,00	50.447.500,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	150 Orang	36,165,830.00	34.510.000,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	18.000.000,00	15.937.500,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	16%	16%	13.500.000,00	12.000.000.00
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Edukasi Penyuluhan tentang KG dan Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, Pengaturan Ekonomi Keluarga	850 Orang	850 Orang	13.500.000,00	12.000.000.00

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen	13.500.000,00	12.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Data Sektoral Terpilah yang Valid	100%	100%	26.078.012,00	13.114.006,00
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Data Sektoral terpilah yang Valid	100%	100%	26.078.012,00	13.114.006,00
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	26.078.012,00	13.114.006,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori KLA	Nindya	Nindya	5.085.000,00	3.142.500,00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA	100%	100%	5.085.000,00	3.142.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5.085.000,00	3.142.500,00

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	92%	92%	370.841.800,00	356.166.800,00
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92 Anak	92 Anak	50.750.000,00	50.750.000,00
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	150 Orang	150 Orang	50.750.000,00	50.750.000,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten	92%	92%	166.581.800,00	166.581.800,00
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	76 Orang	76 Orang	166.581.800,00	166.581.800,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah terstandarisasi	14,91%	14,91%	153.510.000,00	138.835.000,00

Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	30 Orang	34.510.000,00	34.510.000,00
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	5 Dokumen	5 Dokumen	119.000.000,00	104.325.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				13.538.806.000,00	13.537.446.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MUKP	20,6%	20,6%	634.600.000,00	633.240.000,00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000,00	101.640.000,00
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000,00	101.640.000,00

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid	2 Dokumen	2 Dokumen	531.600.000,00	531.600.000,00
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	22 Laporan	22 Laporan	207.600.000,00	207.600.000,00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	22 Dokumen	22 Dokumen	264.000.000,00	264.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	ASFR	9,24	9,24	6.547.406.000,00	6.574.367.000,00
	Unmetneed	8,0	8,0		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10 Organisasi	10 Organisasi	1.879.000,000.00	1.879.000,000.00
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	22 Laporan	22 Laporan	1.174.000,000.00	1.174.000,000.00

	Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	4 Laporan	330.000.000.00	330.000.000.00
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000.00	125.000.000.00
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	10 Organisasi	250.000.000,00	250.000.000,00

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)	80%	80%	744.000.000,00	744.000.000,00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	248 Orang	248 Orang	744.000.000,00	744.000.000,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100%	100%	3.218.806.000,00	3.245.767.000,00
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	44.100.000,00	44.100.000,00
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7814 Orang	7814 Orang	3.139.156.000,00	3.166.117.000,00

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	2 Laporan	35.550.000,00	35.550.000,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	80%	80%	705.600.000,00	705.600.000,00
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	248 Kampung	248 Kampung	705.600.000,00	705.600.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	IPK	51,97	51,97	6,220,900,000.00	6,220,900,000.00
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	84%	84%	6.356.800.000,00	6.356.800.000,00

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	120 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	60.169 Orang	2.829 Orang	6.223.800.000,00	6.223.800.000,00
Jumlah				18.825.416.430,00	18.900.799.243,00.

Sumber: Dinas P3APPKB

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas DP3APPKB serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Perubahan Rencana Strategis Dinas P3APPKB 2021-2026 maka diterapkan Program dan Kegiatan Tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan yang ada dalam mencapai visi dan misi dengan 10 program dan 24 kegiatan serta 46 sub kegiatan. Program kegiatan yang telah direncanakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur, sarana prasarana yang ada dan tentunya dukungan anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar.

Blitar, Juli 2025

KEPALA DINAS P3APPKB
KABUPATEN BLITAR


Drs. M. HANKAM INDORO, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19670929
199202 1 002